

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam konsep Abu Hasan Ali Al-Mawardi tentang pembagian kekuasaan terbagi menjadi dua bagian yakni ahlul hali wal aqdi dan imamah. keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda ahlul hali wal aqdi berwenang untuk membuat suatu perundang undangan, sedangkan imamah berwenang sebagai menjalankan roda pemerintahan, begitupun pada zaman tersebut lembaga peradilan atau yudikatif masih menyatu pada khalifah. perkembangan ini sudah berkembang pada zaman khalifah umar bin khattab yang mana selalu menyelesaikan persoalan masyarakat arab. maka dari itu dalam setiap negara yang demokrasi perlu adanya lembaga tersebut guna terciptanya keadilan pada suatu negara. namun di Indonesia lembaga peradilan dipisahkan dari lembaga eksekutif, agar lebih efisien melaksanakan roda pemerintahan sesuai wewenangnya masing-masing. di Indonesia kekuasaan kehakiman atau badan peradilan dipegang oleh lembaga yudikatif.
2. Korelasi pemikiran al mawardi terkait sistem politik dalam memilih pemimpin negara yakni mempertahankan status quo yang mana Abu Hasan Ali Al-Mawardi tetap mempertahankan bangsa arab sebagai pemimpin. begitupun dalam sistem politik di indonesia yang tertuang pada pasal 6 ayat 1 UU 1945 berbunyi "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. artinya di indonesia pun mempertegas bahwa calon pemimpin negara harus berasal dari negara asli, karenanya orang asing yang menjadi WNI melalui naturalisasi tidak berhak untuk menjadi presiden karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak

yang berwenang, adanya status quo yang dipertahankan oleh pihak pemerintah membuktikan bahwa relevansinya pemikiran konsep kepemimpinan Abu Hasan Ali Al-Mawardi dan relevansinya sistem politik di Indonesia.

## B. Saran

1. Kepada kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk mengadakan kajian atau seminar terkait pemikiran Abu Hasan Ali Al-Mawardi agar mahasiswa dapat menambah pengetahuan lebih luas.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih jauh mendalami materi atau teori yang berkaitan dengan pemikiran tokoh Islam dari ahli fiqh siyasah.

